

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha umat muslim Indonesia dalam menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara bukan suatu masalah yang baru. Sejak awal pembentukan negara Indonesia, perdebatan mengenai hal ini sudah terjadi dikalangan para tokoh Islam dan kalangan nasionalis. Dari kalangan umat Islam sendiri beranggapan bahwa negara Indonesia pantas untuk menerapkan hukum Islam sebagai dasar negara, sebab negara ini merdeka tidak lepas dari perjuangan umat muslim. Sedangkan dipihak lain para tokoh nasionalis menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, sebab menurut kalangan nasionalis, negara ini memiliki keragaman budaya dan pengikut agama lain pun memiliki andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Meski berakhir dengan kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, namun aksi ketidak puasan dari kalangan umat Islam yang menginginkan Islam sebagai dasar negara terus bermunculan, berawal dari masa kepemimpinan masih ditangan Soekarno hingga masa Orde Baru pergolakan demi pergolakan terus terjadi. Meski sebenarnya kekuatan politik dan militer pemerintah terus menekan umat Islam agar melemah dan tidak berdaya. Hal ini bahkan mencapai puncaknya pada masa awal pemerintahan Soeharto. Di bawah pemerintahan Soeharto, Islam menjadi sangat diwaspadai, segala gerak-gerik umat Islam diperhatikan. Sehingga pada masa Orba Islam terkekang dan nyaris tak bisa berikutik.

Pemerintahan Soeharto yang terkenal sangat kuat dan militeristik, telah mampu membuat masyarakat sipil bungkam dalam segala hal. Seperti halnya partai politik pada masa itu, yang fungsinya dapat dikendalikan sesuai keinginannya. Partai politik pada masa pemerintahan Soeharto hanya menjadi tiga partai besar, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Dan secara konvensional kelompok tertentu wajib memberikan suaranya kepada partai

Golongan Karya yang berafiliasi dengan pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan secara berturut-turut dalam empat kali pemilu, dengan perolehan suara terbanyak dan terus memimpin.

Sementara itu, suara-suara umat muslim yang dahulu menginginkannya syari'at Islam ditegakan di negara Indonesia nyaris tak terdengar lagi pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Hal ini boleh jadi dikarenakan intervensi negara yang terlalu kuat terhadap gerak-gerik warganya, termasuk terhadap ormas-ormas yang ada pada saat itu. Yang mana hal tersebut membuat semua menjadi bungkam tidak mampu berbuat apa-apa.

Pemerintahan Orde Baru yang cenderung menekan gerak politik umat Islam kearah relatif lebih netral, yaitu kearah kebudayaan. Sebagaimana menurut para pengamat Islam Indonesia bahwa pemerintah sedang menggerakan umat Islam dari minoritas politik ke mayoritas budaya. Hingga pada perkembangan selanjutnya, antara tahun 1980-1990, aktifitas politik bukan lagi merupakan satu-satunya wadah perjuangan berkhidmat kepada Islam. Gerakan Islam pada saat itu bergerak ke arah spektrum baru yang lebih dominan bersifat kebudayaan dari pada politik.

Berdasar sejumlah indikasi yang menunjukan sejarah umat Islam ditanah air ini setidaknya memiliki beberapa karakteristik pada tahun 80-an. Pertama, memudarnya politik Islam yang digantikan dengan bangkitnya intelektual muslim. Kedua, melemahnya hal-hal yang bersifat *furu'iyah*. Dan menonjolnya isu-isu sosial,ekonomi, intelektual, dan estetika dalam Islam. Ketiga, melemahnya sikap-sikap sektarian. Dan tumbuhnya sikap non-sektarian dikalangan sebagian besar umat Islam. Ke-empat, memudarnya konsep umat Islam sebagai komunitas yang di ikat oleh organisasi masa atau partai politik Islam yang eksklusif, dengan kata lain dalam hal ini muncul wajah Islam baru yang inklusif¹.

¹ Muh Syamsuddin, "Dinamika Islam pada Masa Orde Baru". Jurnal Dakwah. Vol.XI No. 2, Desember 2010, hal.147.

Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, perjuangan sebagian dari umat Islam yang ingin menegakan syari'at Islam di Indonesia tentu saja belum juga surut. Ditambah lagi dengan kebijakan Soeharto yang menginginkan diterapkannya asas tunggal, demi kepentingan politiknya itu. Tentu saja ada yang menyetujui dan ada pula yang menolak, terutama dikalangan ormas dan parpol.

Dengan kebijakan-kebijakan Soeharto yang dianggap semakin menekan umat Islam dan dirasa menindas umat Islam Indonesia, memunculkan pemberontakan dari kalangan umat Islam. Di antara pemberontakan yang mencuat pada era Soeharto adalah kebangkitan *Komando Jihad*, sebuah gerakan yang berakar pada sisa-sisa jaringan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). DI/TII sendiri telah dihancurkan pada awal 1960-an, namun ideologi perjuangan pendirian negara Islam masih bertahan dalam sebagian kecil kelompok bawah tanah.

Komando Jihad muncul kembali pada akhir 1970-an, dan menurut beberapa penelitian, terdapat indikasi bahwa intelijen negara berperan dalam mendorong kebangkitan kelompok ini untuk memetakan jaringan ekstremis Islam dan melemahkan oposisi Islam terhadap pemerintah². Komando Jihad terlibat dalam berbagai aksi, seperti perampokan bank, penyerangan pos polisi, dan rencana pembajakan pesawat.

Pemerintah merespons dengan operasi penindakan besar, menangkap dan mengadili puluhan tokoh yang dituduh sebagai anggota gerakan tersebut. Pemberontakan tersebut memperlihatkan pola ketegangan ideologis antara sebagian kelompok Islam dan negara. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pada saat bersamaan, pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap organisasi-organisasi Islam.

Puncak ketegangan terjadi ketika pemerintah memperkenalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa seluruh

² Ken Conboy, *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, Equinox Publishing, 2006.

organisasi masyarakat dan politik diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai *asas tunggal*. Kebijakan ini tidak hanya memaksa organisasi Islam menghapus asas Islam dari anggaran dasarnya, tetapi juga menempatkan negara sebagai penafsir tunggal ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam, kebijakan tersebut merupakan bentuk “sekularisasi paksa” yang mengurangi peran agama dalam kehidupan masyarakat dan mereduksi identitas Islam dalam ranah publik³.

Penolakan terhadap asas tunggal terlihat jelas di lingkungan aktivis Islam kampus pada 1980-an. Gerakan dakwah kampus yang berkembang pesat sejak 1970-an merasa bahwa negara memasuki wilayah keyakinan keagamaan masyarakat. Bagi mereka, asas Islam merupakan fondasi moral organisasi, dan memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal dianggap mencampuri ajaran agama. Tokoh-tokoh seperti Imaduddin Abdulrahim, yang menjadi pionir dakwah kampus, berkali-kali menyuarakan kritik terhadap pemerintah sebelum akhirnya dibatasi aktivitasnya oleh negara⁴. Ketegangan di kampus-kampus inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor munculnya gerakan militansi Islam di periode-periode berikutnya, termasuk jaringan yang kemudian berkembang menjadi Jamaah Islamiyah.

Sementara itu, program *Penataran P4* (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menjadi kewajiban bagi pegawai negeri, pelajar, mahasiswa, dan unsur masyarakat lain sejak akhir 1970-an. P4 bertujuan menanamkan loyalitas kepada Pancasila melalui penataran intensif yang berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Pemerintah memposisikan P4 sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, namun sebagian kalangan akademisi dan aktivis mengkritiknya sebagai bentuk indoktrinasi politik negara, karena penataran tersebut sering kali disertai tekanan administratif—misalnya sebagai syarat naik pangkat, kelulusan, atau proses

³ David Bourchier & Vedi R. Hadiz (eds.), *Indonesian Politics and Society: A Reader*, RoutledgeCurzon, 2003.

⁴ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam*, ISEAS Publishing, 2013.

administrasi tertentu. P4 dianggap menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang lebih dominan daripada ajaran agama dalam kehidupan sosial masyarakat⁵. Kritik ini paling kuat muncul dari kalangan umat Islam yang merasa bahwa penataran tersebut membatasi ekspresi keagamaan mereka.

Selain ketegangan ideologis, kebijakan negara terhadap kelompok Islam juga memicu sejumlah peristiwa kekerasan, salah satunya *Peristiwa Tanjung Priok 1984*. Tragedi ini berawal dari ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat Muslim di Tanjung Priok terkait pemasangan tanda peringatan di lingkungan masjid. Penangkapan beberapa tokoh lokal yang dianggap menolak aturan pemerintah memicu demonstrasi besar yang berakhir dengan tindakan represif aparat. Banyak saksi mata dan laporan HAM menyatakan bahwa korban jiwa jauh lebih banyak daripada yang diakui pemerintah. Peristiwa ini memperlihatkan pola hubungan negara dan umat Islam yang penuh ketidakpercayaan, serta memperkuat narasi bahwa pemerintah Orde Baru tidak memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi Muslim⁶. Dari perspektif historis, Tanjung Priok menjadi salah satu simbol represi negara terhadap kelompok keagamaan pada masa Soeharto.

Pemerintah juga menghadapi gerakan-gerakan bersenjata lain yang muncul dari akar ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Di Aceh, *Gerakan Aceh Merdeka (GAM)* bangkit pada 1976 di bawah Hasan di Tiro. Meskipun tidak berbasis ideologi Islam seperti DI/TII atau Komando Jihad, GAM memanfaatkan sentimen keagamaan dan identitas etnis Aceh yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Pada akhir 1980-an, Soeharto menerapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, yang menimbulkan ribuan pelanggaran HAM dan memperkuat resistensi masyarakat lokal terhadap pemerintah⁷. Walaupun GAM bukan

⁵ Robert Elson, *Constructing the Nation: Ethnicity, Religion and Nationalism in Indonesia*, NUS Press, 2008.

⁶ Robert W. Hefner, "Islam, State and Civil Society in Indonesia," *The Journal of Asian Studies*, 1999.

⁷ Edward Aspinall, *Modern Indonesia and the Rebellion in Aceh*, *The Journal of Asian Studies*, 2003.

pemberontakan Islam secara ideologis, kemunculannya terjadi dalam konteks ketidakpuasan yang lebih luas terhadap kebijakan Orde Baru yang sentralistik dan represif.

Dalam konteks hubungan negara dan Islam, kebijakan asas tunggal dan P4 dipandang sebagai puncak dari proses depolitisasi Islam yang telah berlangsung lama. Pemerintah Orde Baru berusaha membatasi peran politik Islam dan lebih mendorong pendekatan yang bersifat kultural. Bahkan, dalam beberapa studi disebutkan bahwa pemerintah sengaja memperlemah organisasi-organisasi Islam yang dianggap berpotensi menjadi kekuatan oposisi. Penerapan asas tunggal dipahami oleh sebagian peneliti sebagai strategi untuk mengontrol organisasi sosial yang memiliki basis massa besar, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Walaupun kedua organisasi ini akhirnya menerima asas tunggal, penerimaan tersebut tidak lepas dari pertimbangan pragmatis untuk menjaga keberlangsungan organisasi di bawah tekanan negara⁸.

Ketegangan juga terjadi karena selama sebagian besar era Soeharto, posisi politik umat Islam tampak kurang diakomodasi. Partai-partai Islam dipaksa melebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan diharuskan mengganti lambang Ka'bah dengan bintang segi lima sebagai konsekuensi dari kebijakan asas tunggal. Langkah ini memperkuat persepsi bahwa pemerintah ingin menghilangkan simbol-simbol Islam dari arena politik. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengendalikan ceramah keagamaan, khutbah Jumat, dan lembaga pendidikan Islam melalui mekanisme izin dan pengawasan. Kebijakan-kebijakan tersebut menambah ketegangan antara negara dan sebagian umat Islam yang merasa identitas dan kebebasan mereka terancam⁹.

⁸ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, ISEAS, 2003.

⁹ William Liddle, *Leadership and Culture in Indonesian Politics*, Allen & Unwin, 1996.

Tepat pada 1980-an, di Jawa Barat muncul seorang pendakwah bernama Imran bin Muhammad Zein dari Medan. Yang dalam dakwahnya tersebut ia banyak mengkritik kebijakan pemerintah dan mengajak penghapusan bid'ah dan syirik yang menurutnya sudah mengotori kemurnian ajaran Islam di Indonesia. Sontak hal ini begitu menarik perhatian para pemuda muslim di Jawa Barat pada saat itu, khususnya di Cimahi.

Ceramah-ceramah Imam muda tersebut dianggap lantang dan berani mengundang berbagai spekulasi dimasyarakat. Selain banyak yang setuju dan mendukung gerakannya, tak sedikit pula yang menentang ceramah dan gerakan yang dipimpin oleh imam muda yang bernama Imran tersebut. Ceramah Imran dianggap terlalu berlebihan dan menyimpang oleh sebagian warga, sebab terlampau sering dalam ceramahnya Imran menggunakan kata-kata kasar terhadap ulama-ulama Indonesia yang tidak sejalan dengannya. Hal tersebut memunculkan konflik dimasyarakat yang setuju dan sependapat dengan sang imam, dengan masyarakat yang tidak sepakat dengannya.seperti halnya dalam masalah adzan jumat yang menurutnya hanya satu kali adzan saja. Kisruh ini pun mengundang wali kota Cimahi pada saat itu untuk membubarkan jamaah dan kegiatan Imran bersama dengan anggotanya.

Pembubaran serta penangkapan terhadap beberapa anggota gerakan Imran bin Muhammad Zein tersebut selanjutnya menjadi sebuah ancaman yang mengerikan bagi pemerintah. Imran dan anggotanya melakukan tindakan diluar dugaan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Iya melakukan pembajakan pesawat yang menggemparkan dunia internasional, dengan membajak pesawat Garuda DC-9 Woya, jamaah Imran membajak pesawat Garuda dalam rangka pertukaran sandera dengan jamaahnya yang ditahan karena kasus penyerangan Kosekta 8606 Cicendo Bandung, yang menyebabkan 3 orang polisi meninggal ditempat dan satu lainnya mengalami luka berat.

9 Januari 1981 salah seorang jamaah Imran yang bernama Amsurizal, melakukan percobaan pembunuhan terhadap Dr. Syamsudin. Hal ini disebabkan oleh adanya isyu bahwa Syamsudin yang menyebarkan berita adanya kelompok Imraniah. Amsurizal yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Bandung ini berani melakukan perbuatan keji tersebut dengan bekal senjata dari Najamudin berupa bubuk pasir yang dicampur merica.

Penyerangan terhadap Syamsudin terjadi dilantai dua masjid Istiqomah Bandung. Pada saat medatanginya, Amsurizal menyiramkan bubuk merica tersebut dan langsung menghujamkan belati ketubuh Syamsudin. Beruntung pada kejadian ini Syamsudin dapat selamat. Begitu pun pada penyerangan yang kedua kalinya, Syamsudin dapat selamat dari maut.

Selain daripada kasus-kasus tersebut, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi. Seperti pada para anggota jamaahnya sendiri, siapa saja yang keluar dari anggota maka harus dibunuh, sebab dianggap akan berani membocorkan rahasia. Seperti yang terjadi pada Najamudin, ia dibunuh oleh para pengikut Imam Im setelah dicurigai sebagai penghianat.

Ali Murtopo dan Murtono pun masuk pada daftar orang yang harus dibunuh. Untuk membunuh Menteri penerangan Ali Murtopo, jamaah memata-matai rumahnya di jalan Mataram. Sedangkan untuk membunuh ketua Golkar Amir Murtono jemaah menugaskan Haji Muhamad Yusuf untuk menyelidiki kapal terbang yang biasa ditumpanginya dan kemudian nanti dibajak. Beruntung niat pembunuhan ini gagal dikarenakan para jamaah tertangkap terlebih dahulu sebelum mereka melancaarkan aksinya.

Desember 1980, menjelang akhir diselenggarakannya Opec di Bali, jamaah Imran menawarkan diri untuk membajak pesawat yang ditumpangi Menteri Perminyakan Irak. Hal tersebut untuk membala sakit hati Iran karena dulu menteri perminyakan Iran pernah disandera oleh Irak. Selain

itu, Mahrizal sebagai juru bicara meminta bantuan berupa uang, senjata api, pistol, granat dan senjata anti tank¹⁰.

Untuk mengadakan hubungan luar negeri, jemaah Imran juga pernah berkirim surat ke Iran, yang ditujukan kepada Pemimpin Revolusi Iran Ayatulah Rohullah Khomeini, yang isinya ucapan selamat atas kemenangannya dan memperkenalkan bahwa di Indonesia telah berdiri Dewan Revolusi Islam Indonesia, yang bergerak dibawah tanah, dan yang terakhir memohon bantuan moril maupun materil dari Imam Ayatullah agar berhasil menegakkan agama Islam menurut aturan Qur'an dan Hadits.

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada era Soeharto memperlihatkan bahwa sistem politik Orde Baru sangat sensitif terhadap gerakan yang dianggap mengancam stabilitas. Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan yang dominan, sehingga banyak ketegangan ideologis berubah menjadi konflik terbuka. Kebijakan asas tunggal dan P4, meskipun secara formal bertujuan memperkuat persatuan nasional, justru menimbulkan resistensi karena dipersepsikan sebagai alat kontrol negara terhadap agama. Resistensi tersebut mewujud baik dalam bentuk pemberontakan bersenjata, protes masyarakat, hingga gerakan bawah tanah yang muncul dari kelompok Islam dan kelompok masyarakat lain yang merasa terpinggirkan.

Pada akhirnya, hubungan negara dan umat Islam di bawah Orde Baru merupakan cerminan dinamika kekuasaan yang kompleks antara ideologi negara, aspirasi keagamaan, dan stabilitas politik. Penerapan asas tunggal dan P4 menjadi simbol represi negara terhadap kebebasan beragama dan berorganisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut berkontribusi pada delegitimasi Orde Baru menjelang akhir kekuasaannya, karena masyarakat semakin menuntut ruang politik yang lebih demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak agama dan masyarakat sipil. Setelah Soeharto jatuh pada 1998, asas tunggal dan penataran P4 dihapuskan, dan organisasi

¹⁰ Anjar Any, *Imran Imam Jamaah*, (Solo : CV Mayasari, 1982), hal.20.

kemasyarakatan kembali mendapat kebebasan menentukan asasnya masing-masing. Transformasi ini menunjukkan bahwa pengalaman masa Orde Baru telah memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebebasan masyarakat dalam negara demokratis.

Dengan latar belakang kejadian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang gerakan Imran pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1980-1985. Yang mana karena gerakan Imran tersebut telah membangkitkan pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya berusaha untuk melakukan revolusi Islam pada masa itu. Selain dari pada itu, yang menarik dari Jamaah ini dimana pada saat itu pemerintah membungkam segala yang dianggap mengancam pemerintahan yang salah satunya adalah Islam, namun tiba-tiba muncul sebuah gerakan Islam jamaah ini yang dengan berani terang-terangan berdakwah menentang dan menjelek-jelekan pemerintah, bahkan berniat menggulingkan pemerintahan Soeharto.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguraikan dan mendeskripsikan mengenai Peran Imran bin Muhammad Zein di Jamaah Islam pada Tahun 1976-1982. Agar dalam proses pendeskripsiannya lebih terarah maka penelitian ini harus dibatasi dan dirumuskan. Pokok permasalahan yang dibahas peneliti menitik beratkan pada Peran Imran di Islam Jamaah.

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada tahun 1976-1982 saja, sebab pada tahun tersebutlah Imran bin Muhammad Zein menyebarluaskan pemahamannya melewati dakwah-dakwah yang dilakukannya di Jawa Barat dan tempat-tempat lainnya di Indonesia. Namun setelah pemerintah dapat melumpuhkan gerakan Islam Jemaah yang dipimpin oleh Imran, kelompok ini tidak lagi ada sehingga peneliti hanya membatasi penelitian ini hanya pada kurun waktu 1980-1985.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan inti permasalahan dari penelitian ini ialah mengenai Peran Imran bin Muhammad Zein di Islam Jamaah pada Tahun 1976-1982. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Imran bin Muhammad Zein?
2. Bagaimanakah peran Imran di Islam Jamaah pada Tahun 1976-1982?
3. Bagaimanakah peran Imran dalam mengembangkan Islam Jamaah?

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berguna sebagai patokan untuk menentukan kearah mana penelitian ini dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Adapun arti penting penelitian ini bagi peneliti ialah dimana penelitian tentang Peran Imran di Jamaah Islam ini belum ada yang meneliti. Hal ini menjadi celah kajian penting bagi peneliti sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan Imran bin Muhammad Zein.
2. Menjelaskan bagaimana Peran Imran bin Muhammad Zein di Jamaah Islam pada Tahun 1976-1982.
3. Menjelaskan bagaimana peran Imran dalam mengembangkan Islam Jamaah(kelompok Imraniah).

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dalam dunia akademik diharapkan menjadi sumbangsih informasi mengenai Imran bin Muhammad Zein.
2. Sebagai gambaran untuk peneliti selanjutnya mengenai Imran bin Muhammad Zein.
3. Menambah koleksi Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliput mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut para ahli, kajian pustaka ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya¹¹.

Ada pun peristiwa yang penulis teliti ini adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Mulai dari penyerangan di Kosekta Cicendo yang menewaskan tiga orang polisi, dan satu lainnya terluka parah. Hingga puncaknya pembajakan pesawat Garuda di Woyla. Kasus ini adalah kasus yang sangat menggantarkan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, sebab untuk pertama kalinya pemerintah harus menangani peristiwa seperti ini.

Peristiwa penting tersebut tersebar dengan cepat beritanya keseluruhan penjuru Indonesia melalui radio-radio dan surat-surat kabar pada saat itu. Tak ketinggalan para pemburu berita dan para penulis menorehkan penanya untuk mencatat peristiwa bersejarah tersebut, Mulai dari dalang dibalik peristiwa tersebut hingga pembajakan dan proses penyelamatannya. Adapun karya-karya tersebut yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, buku “ Benny, Tragedi Seorang Loyalis” yang ditulis oleh Julius Pour. Buku ini membahas perjalanan hidup, karier, dan keberhasilan-keberhasilannya dalam melaksanakan tugas negara. Pembahasan dalam buku ini salah satunya adalah pembebasan para tawanan pesawat Garuda yang dibajak oleh jamaah Imam Im. Yang

¹¹ Fatkhan Amirul Huda, “Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka”(<https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>, diakses pada 29 Juli 2017, pukul 10.10)

mana Benny dan pasukan anti teror berhasil meringkus para pembajak dan menyelamatkan para tawanan.

Kedua, buku “Operasi Pembebasan Sandera Pesawat Garuda di Bangkok”, Karya S. Saiful Rahim. Buku ini secara mendalam membahas mengenai pembebasan pesawat Garuda dari tangan para pembajak, mulai dari awal pembajakan pesawat, hingga proses penyelamatan yang dilakukan oleh ABRI.

Ketiga, jurnal “Dinamika Islam pada Masa Orde Baru” yang ditulis oleh Muh Syamsuddin, jurnal ini berisi pembahasan bagaimana perkembangan Islam dibawah pemerintahan Soeharto, hingga tumbangnya Soeharto.

Ke empat, Skripsi Ingkan Dhika Pratiwi yang berjudul “Perkembangan dan Peran Muhamadiyah di Salatiga pada Tahun 2000-2015. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Muhamadiyah serta perkembangan Muhamadiyah di Salatiga dari Tahun 2000-2015.

Ada pun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan hasil-hasil penelitian diatas, penulis lebih spesifik membahas mengenai Peran Imran bin Muhammad Zein dalam Gerakan jemaah Imran pada Tahun 1980 hingga 1985 di Bandung Jawa Barat.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya sejarah yang bermutu, tentu saja diperlukan suatu cara atau metode sejarah untuk merekonstruksi masa lampau. Ada pun dalam sejarah terdapat metode tersendiri dalam mengungkapkan suatu peristiwa dimasa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis, kritis, ilmiah dan obyektif.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu penyelidikan yang mengklasifikasikan metode pemecahan masalah ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Heuristik

heuristik atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde* ialah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah¹². Heuristik ini adalah tahapan pertama dalam pembuatan karya sejarah.

Dalam tahapan heuristik sendiri, menurut bahannya sumber dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis atau dokumen dan *artefact*. Sumber tertulis atau dokumen sendiri bisa peneliti dapatkan dalam berbagai macam bentuk seperti surat-surat-notulen rapat, kontrak kerja, bon-bon, dan lain sebagainya. Namun apabila sumber berupa dokumen tertulis tidak dapat ditemukan peneliti hanya bisa bergantung pada artefak (berupa foto, bangunan atau alat-alat), sumber lisan dan sumber kuantitatif¹³.

Adapun dalam tahap pengumpulan sumber ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan.

Sumber-sumber yang peneliti dapatkan yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber primer berupa koran dan majalah yang diterbitkan pada tahun yang sedang diteliti. Dan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal dan skripsi yang memuat informasi yang sedang diteliti yaitu mengenai Imran bin Muhammad Zein.

Adapun sumber-sumber yang berhasil peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Sumber primer

Sumber tertulis

- a) Majalah Tempo, edisi 16 Agustus 1980

¹² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012), hlm. 67.

¹³ Kuntowijoyo. (2018). *metodologi penelitian sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana, hal 73-75.

- b) Majalah Tempo, edisi 9 Januari 1982
- c) Majalah Tempo, edisi 6 Februari 1982
- d) Majalah Tempo, edisi 27 Februari 1982
- e) Majalah Tempo, edisi 20 Maret 1982
- f) Majalah Tempo, edisi 3 April 1982
- g) Buku S. Saiful Rahim yang berjudul “Operasi Pembebasan Sandera Pesawat Garuda di Bangkok”, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1981.
- h) Buku Anjar Any yang berjudul “dari Cicendo ke meja hijau, Imran Imam Jamaah”, Solo : CV MAYASARI, 1982.
- i) Buku B. Wiwoho yang berjudul “ Operasi Woyla”, Jakarta : PT. Menara Gading Nusantara, 1981.
- j) Buku Emron Pangkapi yang berjudul “Hukuman Mati Untuk Imam Imran” ,Bandung:Penerbit Alumni, 1982.

Sumber Benda

- a) Mesjid Istiqomah Bandung.
- b) Kantor Kosekta Cicendo, Bandung.
- c) Sumber sekunder
- d) Sumber tertulis

Buku

- a) Buku Julius Pour yang berjudul “BENNY tragedi seorang loyalis”, Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2007.
- b) Buku Helius Sjamsuddin yang berjudul “ Metodologi Sejarah”,Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012.
- c) Buku Prof. Dr. Nina Herlina, M.S yang berjudul Metode Sejarah”, Bandung : Setya Historika, 2020.
- d) Buku Kuntowijaya yang berjudul “Pengantar Ilmu Sejarah”, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2018.
- e) Buku Kuntowijoyo yang berjudul “ Metodologi Sejarah Edisi Kedua”, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.

Artikel

- a) Fadrik AzizFirdaus. Siapakah Imam Imran, Dalang Pembajakan Woyla. Diakses melalui : <https://tirto.id/siapakah-imam-imran-dalang-pembajakan-woyla-cGQJ> pada 14 November 2021.
- b) Mata Indonesia. Peristiwa Cicendo, Pemantik Pembajakan Woyla Tahun 1981. Diakses melalui <https://www.mineWS.id/kisah/peristiwa-cicendo-pemantik-pembajakan-woyla-tahun-1981> pada 14 November 2021.
- c) Historia.id. Target Pembunuhan Jamaah Imran. Diakses melalui <https://today.line.me/id/v2/article/KB9lko> pada tanggal 14 November 2021.
- d) Boomboxzine. Imran bin Muhammad Zein; Dari Gerakan Salafy, Sampai Pembajakan Pesawat Garuda. Diakses melalui <https://boomboxzine.net/imran-bin-muhammad-zein-dari-gerakan-salafy-sampai-pembajakan-pesawat-garuda-figure/>

2. Kritik

Pada tahap ini sumber data yang dihimpun untuk kemudian diuji melalui kritik yang bertujuan untuk menyeleksi data dan fakta melalui kredibilitas sumber. Kritik terhadap sumber sendiri terdiri dari kritik ekstern dan intern . kritik ekstern merupakan pengujian terhadap keontetikan, keaslian, turunan dan relevan tidaknya suatu sumber. Sedangkan kritik intern merupakan pengujian terhadap isi atau kandungan sumber.

1. Ekstern

Tulisan

- a. Majalah Tempo, edisi 16 Agustus 1980. Majalah ini penulis dapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari.

Dengan keadaan sudah dijadikan kliping dan tidak utuh. Majalah ini sudah digunting dan hanya menyisakan berita mengenai Imam Baru di Bandung saja. Adapun kertasnya sudah menguning, tetapi tulisannya masih jelas untuk dibaca.

- b. Majalah Tempo, edisi 9 Januari 1982. Majalah ini penulis dapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari. Dengan keadaan sudah dijadikan kliping, dan pada edisi ini terdapat 3 lembar yang membahas berita mengenai Imran. Adapun keadaan fisiknya masih utuh, tetapi kertasnya sudah berwarna kuning. dari tulisannya sendiri majalah ini masih jelas untuk dibaca.
- c. Majalah Tempo, edisi 6 Februari 1982. Majalah ini didapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari. Majalah ini penulis dapatkan dalam bentuk kliping namun dalam keadaan satu halaman utuh. Keadaan kertasnya sudah berwarna kuning, namun tulisannya masih jelas untuk dibaca.
- d. Majalah Tempo, edisi 27 Februari 1982. Majalah ini penulis dapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari. Dengan keadaan sudah dijadikan kliping, satu lembar utuh. Keadaan kertasnya sudah berwarna kuning, tetapi tulisannya masih jelas dan terbaca.
- e. Majalah Tempo, edisi 20 Maret 1982. Majalah ini penulis dapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari. Dengan keadaan sudah dijadikan kliping dan satu lembar utuh. Keadaan kertasnya sudah berwarna kuning, namun tulisannya masih jelas untuk dibaca.
- f. Majalah Tempo, edisi 3 April 1982. Majalah ini penulis dapatkan dari perpustakaan Batoe Api, Tanjung Sari. Dengan keadaan sudah dijadikan kliping, dua lembar utuh.

Keadaan kertasnya sudah menguning, tetapi tulisannya masih jelas untuk dibaca.

- g. Buku S. Saiful Rahim yang berjudul “Operasi Pembebasan Sandera Pesawat Garuda di Bangkok”, Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1981. Buku ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Batoe Api, kertasnya sudah menguning tapi masih tertata dengan rapih, masih layak dibaca dan isinya masih lengkap.
- h. Buku Anjar Any yang berjudul “dari Cicendo ke meja hijau, Imran Imam Jamaah”, Solo : CV MAYASARI, 1982. Buku ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Batoe Api, kertasnya sudah menguning tapi masih tertata dengan rapih, masih layak dibaca dan isinya masih lengkap.
- i. Buku Emron Pangkapi yang berjudul “Hukuman Mati Untuk Imam Imran” ,Bandung:Penerbit Alumni, 1982. Buku ini merupakan koleksi peribadi penulis, kertasnya sudah menguning tapi masih tertata dengan rapih, masih layak dibaca dan isinya masih lengkap.
- j. Setelah melalui proses kritik ekstern, penulis menyimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut terbukti keontetikannya. Hal ini didasarkan pada tahun diterbitkannya majalah-majalah tersebut.

2. Intern

- a. Majalah Tempo, edisi 16 Agustus 1980. Pada halaman ini memuat berita mengenai penahanan terhadap 44 anak muda yang diambil dari masjid Istiqomah Bandung.
- b. Majalah Tempo, edisi 9 Januari 1982. Berita yang dimuat pada halaman 12-15 ini, memuat berita mengenai persidangan Imran bin Muhammad Zein, yang dianggap mendalangi penyerangan Kosekta Cicendo, serta dianggap

telah menjelek-jelekan Pancasila dalam ceramah-ceramahnya.

- c. Majalah Tempo, edisi 27 Februari 1982. Memuat berita mengenai tertuduh Salman anggota jamaah yang diduga terlibat dalam penyerangan Kosekta Cicendo. Bahkan rencana penyerbuan tersebut disusun rapih dirumahnya, serta pengakuannya kepada hakim saat sidang, bahwa dia merencanakan revolusi Islam. Sedangkan pada halam 12, memuat berita sang Imam yang menangis meminta diringankan hukumannya, serta tuntutan jaksa yang mengatakan bahwa Imran terbukti bersalah dalam kasus penyerangan Kosekta Cicendo, pembunuhan anggota-anggotanya yang dianggap berkhianat, hingga pembajakan pesawat Garuda.
- d. Majalah Tempo, edisi 20 Maret 1982. Memuat kabar berita yang mana akhirnya Imran dijatuhi hukuman mati. Ia tetap bertanggung jawab atas semua perbuatan anggota jamaahnya.
- e. Majalah Tempo, edisi 3 April 1982. Majalah edisi 3 April ini, yang tepatnya halaman 20-23 ini membahas mengenai bai'at yang menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus kriminal seperti pada Islam Jamaah ini, atau pun pada kasus lainnya seperti DII/TII. Bai'at menjadi subyek yang rawan pada kelompok-kelompok seperti ini. Sebab para pengikutnya akan dihukum apabila tidak menuruti perintah seseorang yang di anggap Imam dikelompok tersebut.
- f. Buku S. Saiful Rahim yang berjudul "Operasi Pembebasan Sandera Pesawat Garuda di Bangkok", Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1981. Buku ini berisikan kronologis pembajakan pesawat Garuda Woya, mulai dari proses

pembajakan, penyelamatan, hingga akhir dari tragedi tersebut.

- g. Buku Anjar Any yang berjudul “dari Cicendo ke meja hijau, Imran Imam Jamaah”, Solo : CV MAYASARI, 1982. Buku ini berisi tentang segala informasi mengenai Imran, mulai dari riwayat hidup Imran, perjalanan hidup Imran, hingga aksi-aksi Imran dan kelompok Islam Jamaahnya.
- h. Buku Emron Pangkapi yang berjudul “Hukuman Mati Untuk Imam Imran” ,Bandung:Penerbit Alumni, 1982.buku ini berisi seluruh informasi mengenai Imran, mulai dari siapa Imran, bagaimana proses terbentuknya Islam Jamaah, hingga proses persidangan Imran dan para anggotanya.
- i. Setelah melalui tahap kritik ekstern dan intern dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut terbukti keontetikan dan kredibilitasnya. Maka dari itu, sumber-sumber tersebut layak untuk dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi ialah suatu kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang ada, serta menguraikan dan menempatkan makna agar saling keterkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kisah sejarah yang selaras dan jelas. Dalam tahapan ini dilakukan analisis berdasarkan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penulisan yang utuh, yaitu historiografi.

Pada tahap ini penulis melakukan analisa sejarah dengan menggunakan teori Anatomi Revolusi yang digagas oleh Crane Brinton, menurutnya Revolusi terjadi karena digerakan oleh seorang ataupun oleh kelompok orang yang memiliki tujuan atau ketertarikan yang sama.¹⁴.

¹⁴ Kuntowijoyo,”Pengantar Ilu Sejarah,”*Jurnal Imu Sejarah*,2013,78.

menurut Crane Revolusi adalah sebuah peristiwa perubahan yang terjadi dalam skala yang besar dan pada waktu yang singkat.

Menurut Crane masyarakat dalam keadaan makmur secara ekonomi pada saat sebelum terjadinya revolusi, yang berarti Revolusi terjadi saat masyarakat mengalami kelaparan atau kesengsaraan. Orang-orang yang sengsara ulai merasakan optimis dan penuh harapan untuk memulai revolusi, menurut Crane orang-orang akan melakukan revolusi bukan ketika mereka lapar tetapi ketika mereka merasakan sengsara.

Dalam kehidupan masyarakat yang cenderung memiliki kelas yang lebih ‘setara’ yang lebih banyak kepahitan kelas yang ada. Adapun kepahitan tersebut menurut Crane diukur dengan faktor ekonomi, sosial dan agama. Sehingga menurut Crane kepahitan menyebabkan ketegangan antara penguasa seperti kelas aristokrat dan pedagang dan bukan antara elit umum dan yang tertindas. Crane menyebutkan ada empat tahap menuju prarevolusi.

Tahap pertama, pemimpin kaum moderat naik ke tampuk kekuasaan sebab mereka ingin menjadi penerus paling alami dari pemimpin yang lama. Hal ini memunculkan beberapa faktor termasuk didalamnya krisis ekonomi, pemerintah pada fase ini tidak dapat mengelola keuangan.

Kedua, kebangkitan kaum radikal menuju kekuasaan. Pada tahap ini kaum radikal memanfaatkan revolusi untuk meraih kekuasaan dan mencoba menunjukkan pengaruh yang lebih kuat kepada pemerintahan moderat. Kaum radikal melakukan hal tersebut karena mereka merupakan sekelompok kecil orang yang terorganisir dengan baik serta memiliki cita-cita dan ambisi yang tinggi. Kekuasaan berada ditangan otoritas yang kuat dan terpusat.

Ketiga, periode krisis. Rezim teror oleh kaum radikal yang berkuasa terwujud melalui pembunuhan, eksekusi dan penumpasan oposisi. Kaum radikal membangun otoriter yang mengorek-orek kehidupan masyarakatnya. Rezim teror yang brutal. Ditambah dengan kondisi tata kelola sumber daya yang tidak efisien dan ketimpangan kelas, hal tersebut mengobarkan

semangat revolusi. Rezim teror yang idealis dan radikal bertujuan menciptakan kesempurnaan melalui cara-cara yang kejam dan tidak disukai rakyat. Rezim seperti ini memicu reaksi Thermidorian.

Keempat, reaksi Thermidorian yang merupakan sebuah reaksi terhadap rezim yang menindas. Selama reaksi Thermidorian ini rakyat menggulingkan pemerintah dan mendukung kaum moderat untuk kembali ke pemerintahan. Setelah kaum moderat kembali ke tampuk pemerintahan, maka masa-masa tenang sebelumnya kembali untuk sementara waktu

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Imran bin Muhammad Zein di Jamaah Islam pada Tahun 1976-1982”, penulis menemukan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan dan mencoba mensintesiskan dengan teori yang berhubungan. Bermula dari Imran bin Muhammad Zein yang berangkat ke Arab Saudi untuk memperdalam keilmuannya di bidang agama, di Arab Saudi Imran berguru pada beberapa ulama diantaranya, Syekh Buhari, Syekh Abdullah, Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Jaelani. Pelajaran yang diterima dari guru-gurunya di Mekah mempengaruhi pemikirannya tentang Islam, terutama setelah mempelajari secara khusus tafsir Al-Qur'an yang menurutnya berbeda sekali dengan yang diajarnya di Medan tempat kelahirannya.

Sekembalinya Imran ke Indonesia ia mendirikan sebuah jemaah yang terdiri atas pemuda-pemuda masjid dari berbagai kota, bertujuan untuk menegakkan Islam yang murni sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadist. Keinginannya tersebut Imran sampaikan lewat ceramah dan khutbah yang sangat berani. Kepiawaiannya dalam berbicara mampu membakar semangat anggotanya untuk menentang segala perbuatan bid'ah dan khurafat, serta menyerang kebijakan-kebijakan presiden Soeharto dan ulama-ulama yang tidak sepaham dengannya.

Imran juga yang sudah memiliki bahan bacaan anggota bahkan hendak melakukan Revolusi Islam di Indonesia. angan-angannya yang ingin memberlakukan hukum Islam Indonesia, berupaya menggaet sebanyak mungkin anggota jamaah. Semua inilah yang melatar belakangi

Imran dan kelompoknya melakukan kegiatan dakwah, pembai'atan anggota dan lain sebagainya.

Dari fakta yang telah diuraikan diatas bahwasanya Imran bin Muhamad Zein sebagai imam Islam Jamaah memiliki peran yang sangat penting dalam kelompok tersebut. Yang mana Imran telah berhasil mendoktrin banyak orang agar bersedia melakukan segala perintahnya serta berhasil membuat banyak kekacauan, terutama di Cimahi, Bandung Jawa Barat.

4. Historiografi

Setelah langkah-langkah sebelumnya terselesaikan, langkah terakhir dalam langkah-langkah penelitian ini ialah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis sejarah harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya tersebut kedalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi¹⁵.

Dalam tahap ini penulis mensistematiskan tulisan hasil penelitian kedalam beberapa bagian, yaitu:

Bab I pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub, diantaranya latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian.

Bab II berisi pembahasan mengenai Biografi Imran bin Muhammad Zein

Bab III berisi pembahasan mengenai :

A. Sejarah Berdirinya Jamaah Islam (Kelompok Imraniah)

B. Peran Imran di Jamaah Islam

C. Peran Imran dalam Mengembangkan Jamaah Islam

1. Pemikiran Imran

2. Gerakan

Dan Bab IV penutup, berisi Kesimpulan

¹⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012), hlm.121.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG